

## Banser antara Perebutan dalam Ketidakpastian dan Kekerasan Politik 1965-1966



**Tri Chandra AP**  
Sejarawan pada

Fakultas Sastra Universitas Jember dan aktif menekuni masalah kebudayaan di Indonesia.

**T**idak banyak peristiwa politik yang lebih kontroversial dalam perjalanan sejarah kebangsaan Indonesia modern dari pada tragedi kemanusiaan yang terjadi dalam tahun 1965-1966. Diawali dengan peristiwa politik nasional yang terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965, sebuah peristiwa yang menurut klaim regim politik Orde Baru bahwa Partai Komunis In-

donesia (PKI) merupakan organ politik yang berdiri di belakang terbunuhnya tujuh perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI AD).<sup>1</sup> Pasca kejadian tersebut, serangkaian tindak kekerasan politik dan politik kekerasan terjadi secara massif terhadap warga PKI mulai dari Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Selatan, Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Bali. (Sundhaussen, 1971, 63, dan lihat juga Crouch, *op.cit.*, 159)

Di Jawa Timur, Barisan Ansor Serba Guna (Banser) secara nyata memainkan peranan penting dalam proses tragedi kemanusiaan 1965-1966. Ada banyak Indonesianis yang mencatat keterlibatan organisasi sayap pemuda dari Nahdlatul Ulama (NU) ini.<sup>2</sup> Hal tersebut tampak juga manakala Tim Pencari Fakta menghadap Presiden Soekarno guna melaporkan hasil temuannya pada bulan Desember 1965. Presiden Soekarno sangat kecewa dengan peranan yang dimainkan oleh Banser dalam tragedi kemanusiaan

<sup>1</sup>Buku-buku produk rezim politik Orde Baru.

<sup>2</sup>Mengacu pada Cribb, 1990: 26, Hughes 1967:154 dan Crouch 1979: 152. Selain itu Muhammadiyah organisasi yang bergerak dalam bidang sosial dan pendidikan juga turut andil selama berlangsungnya tragedi kemanusiaan dengan mengeluarkan fatwa yang menegaskan bahwa pembasmian terhadap warga PKI merupakan tugas suci. (Boland 1982, 145-146) di samping keterlibatan Kokam, sayap pemuda organisasi ini dalam tragedi tersebut.

tersebut. Mengingat posisi politik NU dalam perjalanannya berlandaskan semangat moderasi. Inilah yang menurut Andree Feillard (1997, 37) menjadikan posisi NU berada pada situasi yang sulit di hadapan Soekarno.<sup>3</sup>

Di daerah ini pula (konon) para pemuda desa yang diorganisasikan oleh Banser melakukan penyerangan ke basis-basis PKI, bahkan sebelum militer dan pemerintahan daerah setempat melakukan koordinasi guna mengambil tindakan atas apa yang telah "diperbuat" oleh PKI. Menurut informasi dari salah seorang petinggi Ansor, Jawa Timur sedang dalam keadaan "kosong", karena sebagian besar anggota Kodam Brawijaya dikirim ke perbatasan Kalimantan Utara.<sup>4</sup> Sehingga Banser merasa perlu bergerak lebih dulu melakukan penyerangan ke basis-basis PKI kendati belum ada koordinasi dengan TNI AD. Apa yang dilakukan Banser tersebut kemudian memunculkan kesan dipermukaan bahwa telah terjadi kecacauan kehidupan sosial-politik antar kekuatan politik di masyarakat yang dapat mengarah pada konflik horizontal. Para pelaku kekerasan lapangan secara brutal "menghancurkan" sebagian anggota

masyarakat yang tergabung dalam PKI dan *onderbouw*-nya maupun yang menjadi simpatisannya, ironisnya tidak sedikit pula sebagian dari yang (hanya) dituduh sebagai warga komunis ikut dikejar-kejar, ditangkap, dipenjara tentu saja dilakukan dengan proses dan cara di luar batas peri kemanusiaan, bahkan ada pula yang langsung dibunuh.<sup>5</sup>

Kendati terkesan begitu, namun yang harus dicatat dalam banyak kasus TNI AD merupakan komponen utama yang terlibat langsung dalam proses pembunuhan warga komunis pada tahun-tahun tersebut. Paling tidak dalam tingkatan praktek yang lebih rendah seringkali TNI AD memberi senjata, latihan dasar (*rudimentary*) dan dorongan semangat kepada para pelaku tindak kekerasan di lapangan. Kampanye nasional guna "pembersihan" segala yang berbau komunisme di Indonesia itu berlangsung paling tidak antara tahun 1965-1966.<sup>6</sup> Menurut pikiran konservatif saja lebih setengah juta jiwa melayang (Wilhelm, 1981, 53) akibat dari perilaku kekerasan yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan itu.

Selain berangkat dari berbagai literatur yang menyebutkan keterlibatan Banser

<sup>3</sup>Hal ini dikarenakan posisi NU yang selama masa demokrasi terpimpin masuk dalam *circle* inti dalam percaturan politik kala itu serta terlibat aktif menyokong gagasan NASAKOMnya Soekarno.

<sup>4</sup>Wawancara dengan Chalid Mawardi.

<sup>5</sup>Tentu yang terjadi adalah adanya pengabaian proses pengadilan, bahkan cenderung sewenang-wenang dan menafikan nilai-nilai kemanusiaan merupakan aspek terbesarnya.

<sup>6</sup>Kehancuran total warga komunis di Indonesia ternyata tidak serta merta menyebabkan masalah komunisme selesai begitu rupa. Dalam perjalan selanjutnya ia (Komunisme) terus direproduksi menjadi hantu yang sangat menakutkan. Bahkan hingga sidang tahunan Agustus 2003, isu komunisme masih dijadikan momok yang menakutkan.



secara nyata di Jawa Timur itulah serta berbagai cerita “bangga” sebagian anggota masyarakat NU tentang peristiwa tersebut, saya ingin merekonstruksi bagaimana peristiwa itu terjadi yang kemudian “menyeret” NU untuk terlibat secara aktif. Benarkah keterlibatannya tanpa koordinasi dengan TNI AD, mengingat ketegangan PKI dengan TNI AD sudah sejak era regim Demokrasi Terpimpin. Saya akan mulai melacak (kendati hanya secara selintas) situasi politik makro macam apa yang terjadi pada era sebelum terjadinya tragedi kemanusiaan 1965-1966. Wacana (baik politik maupun ekonomi) apa yang sedang diperebutkan

oleh berbagai kekuatan politik yang ada kala itu? Ini sangat penting guna melihat siapa saja aktor sosial yang “bermain” dan “mempermainkan” apa saja dalam masa tersebut, yang pada akhirnya menjadi semacam “energi” yang mampu mendorong Banser guna terlibat dalam perilaku yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Lantas saya akan merekonstruksi sejauhmana keterlibatan Banser dalam tragedi kemanusiaan tersebut, yang selama berkuasanya regim politik Orde Baru peristiwa tersebut “malah” menjadi semacam petanda bangga bagi pelakunya. Rekonstruksi ini juga penting guna melihat: adakah upaya menolak energi yang mendorong keterlibatan Banser?



### Komunitas Politik Periode Pra 1965-1966

Periode tahun 1950-an merupakan situasi politik yang sangat menentukan dalam perjalanan sejarah Indonesia. Tidak saja (kita) berhasil menyelenggarakan Pemilu pada tahun 1955 yang sebagai petanda berkembangnya kehidupan demokrasi di Indonesia.<sup>7</sup> Tapi juga berkembang perilaku elit politiknya secara bebas (hanya) melakukan mobilisasi massa dan politisasi politik, yang kemudian mendorong terfragmentasinya masyarakat politik Indonesia dalam batas-batas politik yang sangat jelas sebagaimana diamati

<sup>7</sup>Lihat Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusi di Indonesia, Studi Sosio-Legal Alat Konstitusi* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1995).

oleh Feith (1957, 13). Pada periode ini juga menandai lahirnya politisasi agama guna mempersekusi dan mengeksekusi lawan politiknya.

Tampilnya PKI pada periode ini memang sangat mengejutkan berbagai kalangan kala itu, kendati (hanya) menduduki posisi keempat (Pemilu 1955): meraih 16,4% pemilih di bawah PNI

tahun 1957 dan 1958. Kendati tetap tidak bisa menggusur dominasi suara dari NU, naum partai yang berfaham komunis ini menjadi satu-satunya partai politik yang prosentasenya menunjukkan grafik meningkat (lihat tabel di bawah), sementara yang lainnya mengalami penurunan.<sup>8</sup>

Pada aras yang lain sebenarnya tabel di atas dapat “dibaca” PKI merupakan

Tabel. Suara (per 1000) yang diperoleh empat partai politik besar dalam Pemilihan Parlemen 1955 dan Pemilihan Majelis Regional 1957-1958

Daerah Jawa Timur	PNI	Masyumi	NU	PKI
26 September 1955	2.251 (22,8%)	1.110 (11,2%)	3.371 (34,1%)	2.300 (23,3%)
29 Juli 1957 dan 25 Februari 1958	1.900 (19,2%)	977 (9,9%)	3.000 (30,4%)	2.705 (27,4%)

Sumber: W.F. Wertheim (1999, 289) yang mencuplik dari kumpulan data Mr. A. Van Mari atas dasar data yang diterbitkan dan yang tidak diterbitkan.

22,3%, Masyumi 20,9% dan NU 18,4% pemilih. (ibid:58) Padahal tahun 1948 nama PKI jatuh di hadapan massa rakyat akibat peristiwa Madiun. Lebih mengagetkan lagi perolehan suara PKI di wilayah Jawa Timur menduduki posisi kedua di bawah dominasi partai kaum Nahdliyyin. (lihat tabel di bawah). Pamor PKI semakin meningkat manakala berlangsung Pemilu lokal yang berlangsung

partai yang lebih berhasil mempermainkan imajinasi massa rakyat kala itu. Mendapat dukungan penuh dari BTI dengan slogan tanah untuk penggarap mampu menarik keikutsertaan massa rakyat. Pada tingkat lain dari tabel tersebut sebenarnya (paling tidak) menjadi pertanyaan atas tesis yang —selama ini berkembang— menyatakan periode 1950-an posisi partai politik merupakan

<sup>8</sup>Begitu pula dengan di beberapa propinsi besar di Indonesia, seperti Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah di mana untuk propinsi terakhir ini PKI tampil sebagai pemenangnya. Sumatra Utara kenaikan PKI juga sangat signifikan, sementara ketiga partai besar lainnya mengalami penurunan yang drastis. Tabel detailnya lihat W.F. Wertheim, *Masyarakat Indonesia dalam Transisi, Studi Perubahan Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999) hlm. 289



cerminan dari garis-garis aliran yang sebelumnya sudah ada. Kalangan *santri* tercermin dalam Masyumi dan Partai NU, *priayi* untuk kalangan kejawaen maupun *abangan* tercermin dalam Partai Nasionalis Indonesia (PNI) dan PKI. Hal itu tergambar dalam tabel di atas, bagaimana simpatisan *santri* dan *priayi* mengalami grafik penurunan dari Pemilu 1955 ke Pemilu lokal. Pada titik inilah sebenarnya paling tidak massa rakyat memiliki imajinasi politiknya sendiri yang berbeda dengan imajinasi para elit politik.

Kemenangan PKI dalam pemilu lokal tersebut tentu mampu membawa elit PKI menempati posisi dalam pemerintahan. Tentu saja hal ini mempertinggi tingkat “keresahan” lingkaran elit politik tidak saja dari dalam negeri tapi juga luar negeri.<sup>9</sup> Keresahan politik dari dalam negeri tentunya datang dari para elit yang berseberangan dengan PKI secara politik.<sup>10</sup> Selain itu menurut analisa WF. Wertheim (1999, 288) kemenangan PKI tersebut menguatkan gerakan separatis PRRI/

Permesta yang muncul pada paruh akhir tahun 1950-an di sebagian Sumatra dan Sulawesi. Kecenderungan separatis itu semakin tampak dalam bentuk anti komunisme, dengan ketakutan dominasi Jawa yang diidentikkan sebagai bahaya komunisme. Gerakan separatis yang melibatkan sebagian elit politik Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) segera dapat ditumpas dengan kolaborasi politik Presiden Soekarno dengan Jendral Nasution (TNI AD).

Berbarengan dengan itu Soekarno mulai mencanangkan gagasan Nasakomnya guna persatuan dan kesatuan. Berbeda dengan Masyumi yang sejak awal berhadapan secara politik dengan PKI,<sup>11</sup> NU yang menempuh permainan politik kooperatif dengan Soekarno tampil sebagai unsur penyokong utama dari gagasan tersebut.<sup>12</sup> Apa yang dilakukan NU merupakan tindakan “terpaksa” mendukung Presiden sambil mengharap akan maksud baik Soekarno guna melindungi kepentingan politik NU.<sup>13</sup> Terlepas

<sup>9</sup>Mengenai keresahan dari luar negeri akibat menguatnya komunisme di Indonesia, yang kemudian mampu menjadi stimulan bagi kekuatan asing khususnya negara-negara kapitalis Amerika dan Inggris lebih jauh terlibat dalam urusan internal Indonesia.

<sup>10</sup>Tidak tanggung-tanggung, adalah Masyumi yang sejak awal menjadi lawan politik PKI. Perlawanan Masyumi tidak saja melakukan mobilisasi politik yang sejak bulan September 1954 melahirkan organisasi Front Anti Komunis (FAK) yang diketuai oleh Mochammad Isa Ansyari. Tapi juga melakukan penggalangan kultural berupa kongres Ulama di Palembang yang dilaksanakan pada 8-11 September 1957. Kongres yang dihadiri oleh sebanyak 350 ulama tersebut merekomendasikan “pengharaman” komunisme di Indonesia. Sementara itu NU yang berusaha keras mempertahankan gagasan Islam tradisional guna tetap berada dalam sistem politik di Indonesia tidak bersedia mengirimmkan delegasinya resmi ke Mukhtar tersebut. (Ricklef, 1981: 393). Sikap anti komunis semakin tebal manakala Masyumi merasa bahwa PKI adalah partai yang menyebabkan mereka dikeluarkan dari *circle* kekuasaan Soekarno.

<sup>11</sup>Menurut salah seorang tokoh Masyumi Jember ketegangan antar kekuatan politik kala itu terjadi secara nyata hingga ke pelosok pedesaan di Jawa Timur. Wawancara 28 September 2000.

dari itu, bagi Allan A Samson (1973, 23) aktifitas politik Islam sejak saat itu dikuasai oleh partai Nahdliyyin. Akan tetapi yang harus dicatat realitas politik sejak berlakunya gagasan Demokrasi Terpimpin menunjukkan kalau permainan politik berkuat pada tiga kekuatan: Soekarno, Militer dan PKI sebagai satu-satunya kekuatan politik yang berbasis massa. NU tidak banyak berpengaruh secara aktual.

Sementara itu, militer Indonesia selama beberapa tahun pasca kemerdekaan, lebih merasa dirinya sebagai kekuatan "pelindung" pada era ini semakin menyatakan dirinya juga berada pada ranah politik.<sup>14</sup> Tentu saja militer mulai memiliki orientasi politik sendiri yang kemudian (sering) berbeda dengan kepentingan politik golongan sipil. Lahirlah kepentingan politik yang bersifat extramilitar berupa kepentingan ekono-

mi. Para elit militer mulai memperluas keterlibatannya di bidang ekonomi sejak berlakunya UU Keadaan Darurat Perang tahun 1957.<sup>15</sup> Dengan masuknya militer ke arena yang bersifat extramilitar inilah merupakan petanda awal bagi lahirnya ketegangan kehidupan sosial politik di tahun-tahun selanjutnya.

### Perebutan dalam Ketidakpastian

Sementara itu, kondisi perekonomian nasional yang belum pulih dari perang dengan segera menjadi memburuk. Paling tidak terdapat dua hal pokok yang melatarinya. *Pertama*, Soekarno lebih mementingkan perimbangan kekuatan politik karenanya seringkali menunda berbagai keputusan yang bersifat ekonomi-politik mengingat dianggap dapat merugikan unsur-unsur politik dalam pemerintahan. Mackie (1967, 10). *Kedua*, para elit

<sup>12</sup>Secara politik NU juga menyerang PKI sebagai organ politik yang anti Islam, kendati banyak elit politiknya merasa tidak ada persoalan yang signifikan terhadap golongan komunis ketimbang dengan golongan muslim reformis-modernis yang paling dianggap sebagai rival utamanya. (Choirul Anam, 1985: 42)

<sup>13</sup>Dengan sendirinya dukungan NU ini mendapat kritik yang sangat tajam dari para elit politik eks partai Masyumi. Di samping dalam internal elit NU sendiri juga tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh NU. Adalah Imron Rosyadi yang kemudian bergabung dalam barisan menentang Soekarno. Andree Feillard, "Islam Tradisional dan Tentara dalam Era Orde Baru: Sebuah Hubungan yang Ganjil", dalam Greg Fealy dan Greg Barton, *Tradisionalisme Radikal, Persinggungan Nahdlatul Ulama-Negara* (Yogyakarta: LKiS, 1997) hlm. 44.

<sup>14</sup>Hal itu dikarenakan sejak awalnya terdapat elit militer di Indonesia yang berpandangan bahwa Angkatan Bersenjata adalah alat negara yang bersifat non-politik, di samping banyak pula yang merasa siap menerjunkan diri ke gelanggang perpolitikan nasional. (Crouch, 1986, 222-23)

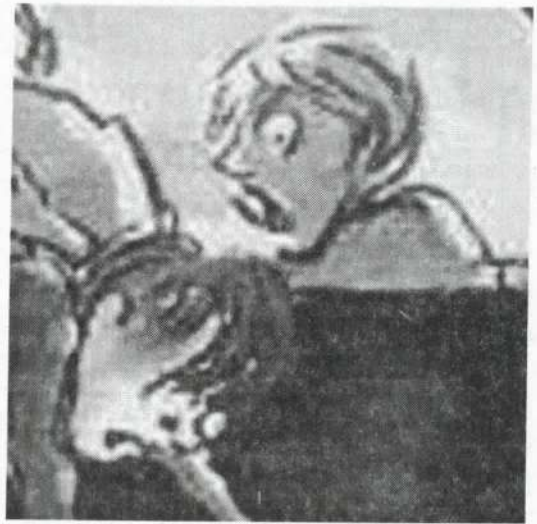
<sup>15</sup>UU tersebut menempatkan militer pada posisi yang memiliki kekuasaan luas, khususnya di luar Jawa karena lemahnya pengawasan dari kalangan sipil. Kendati para Panglima Daerah tidak selalu menggunakan kekuasaan darurat, tapi mereka sering meraup keuntungan langsung dalam pengelolaan administrasi ekonomi seperti pengumpulan pajak, pengeluaran izin usaha dan pemberian fasilitas. Daniel Lev, *The Transition to Guided Democracy: Indonesian Politics, 1957-1959* (Ithaca: Modern Indonesia Project, Cornell University, Ithaca, 1966) hlm 60.



politik sendiri berpandangan masalah sosial-ekonomi sebagai hal yang kurang penting dibandingkan dengan kampanye militer.<sup>16</sup>

Krisis ekonomi tersebut segera direspon PKI dengan mencoba memluas basisnya di pedesaan di seluruh Indonesia, termasuk Jawa Timur. PKI mulai meningkatkan intensitas ide pelaksanaan agenda *landreform*, yang sudah diusung sejak kampanye Pemilu 1955. Setelah gagal menyelesaikan konflik Irian Barat di Sidang PBB atas nama Pemerintah Indonesia berbagai kekuatan rakyat yang bekerja pada perusahaan asing milik Belanda melakukan proses kampanye guna menyita modal milik Belanda di Indonesia. (Harold Crouch, 1986, 37). Sementara itu Pemerintah Daerah di berbagai tempat mulai membicarakan tentang pembagian tanah bekas perusahaan perkebunan milik Belanda di Indonesia untuk kepentingan publik. Menurut Hefner (1999, 336) yang melakukan penelitian di Pasuruhan, ini memberikan peluang PKI guna meneruskan kampanye *landreform*. Pada titik inilah para elit PKI untuk pertama kalinya merasa dirinya mampu menggerakkan orang-orang miskin di pedesaan.

Di lain pihak, bagi elit TNI AD



kampanye penyitaan modal asing itu merupakan tindakan radikal dipelopori oleh organisasi massa komunis dan itu dapat melahirkan kekacauan ekonomi. Guna mencegahnya, maka berdasarkan UU Darurat Perang 1957, Jendral Nasution menempatkan berbagai asset asing itu di bawah kontrol TNI AD. Hal itu kemudian didukung oleh keluarnya Surat Keputusan Penguasa Militer No. 755/PMT/1957 dan No. 1063/PMT/1957 tentang Nasionalisasi Perkebunan Asing. Mulailah para elit TNI AD menguasai berbagai perkebunan dan perusahaan yang sebelumnya milik pemerintah kolonial. Di Jember dan Banyuwangi terdapat istilah Sekar Daha (Surat Koordinator Penem-

<sup>16</sup>Dukungan atas operasi militer melawan separatisme di Sumatera dan Sulawesi memaksa pemerintah mengambil jalan menempuh anggaran defisit yang sangat besar yang kemudian diperburuk oleh adanya dukungan kampanye Irian Barat dan "Ganyang Malaysia". Defisit itu mendorong laju tingkat inflasi. Inflasi memang selalu jadi masalah Indonesia sejak merdeka. Tetapi, baru tahun 1957-1958 inflasi betul-betul jadi masalah serius, karena meningkatnya biaya kemiliteran dan diikuti oleh turunnya pendapatan eksport. Lebih detailnya lihat Mochtar Mas'ud, *Ekonomi dan Struktur Politik Orde Baru 1966-1971* (Jakarta: LP3ES, 1989).

patan Daerah) yang menjadi dasar bagi masuknya elit TNI AD guna penguasaan perusahaan perkebunan eks-kolonial.<sup>17</sup> Paling tidak ketegangan dua kekuatan politik antara Komunis dan TNI AD sejak saat inilah berawal. Semakin meningkat pada tahun-tahun berikutnya di mana masing-masing berupaya untuk saling menjauhkan diri dari kehidupan politik.

Sebagai organ politik yang meletakkan kekuatan politiknya pada basis petani, PKI merasa diuntungkan dengan disahkannya: Undang-undang Pokok Bagi Hasil (UUPBH) 1959 dan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA) 1960. PKI dan BTI tidak saja semakin intensif mengusung isu *landreform*, tapi juga tanpa menyalakan kesempatan untuk mengorganisasikan seluruh kekuatan petani guna merebut hak sesuai dengan UU. Sayangnya pelaksanaan UU tersebut berjalan lambat dan segera dimanfaatkan PKI guna menjadi alasan pokok memobilisasi massa rakyat di pedesaan. Sementara itu keputusan Central Komite PKI (1963) ingin menerapkan strategi revolusioner ala

Republik Rakyat China (Maoisme) melakukan radikalisme massa rakyat dengan jalan *aksi sepihak*<sup>18</sup> sebuah strategi politik yang berbeda dari sebelumnya di mana program konsolidasi partainya sangat hati-hati sepanjang kurun 1950-an. Pergeseran pola revolusioner yang diterapkan oleh PKI telah melahirkan polarisasi masyarakat menjadi dua pihak yang tegas PKI dan Non-PKI.<sup>19</sup>

Pada dasarnya *aksi sepihak* tidak saja senantiasa “merongrong” kewibawaan pemerintah: selalu tercipta suasana revolusioner serta *vacuum* kekuasaan. Tapi juga merupakan rongrongan terhadap pihak yang mapan di wilayah pedesaan. Dengan sendirinya situasi tersebut dapat membalik tatanan kehidupan sosial pedesaan yang sudah lama berlaku. (Ong-hokham, 2002, 12) Diawali dengan demonstrasi para petani penggarap dan aktivis komunis dari daerah lain,<sup>20</sup> kemudian memaksa pemilik guna segera membagi hasil panennya atau tanahnya kepada petani penggarap.<sup>21</sup> Hampir setiap hari pada tahun-tahun tersebut di Jawa Timur

<sup>17</sup>Menurut informasi dari mantan Panitia *landreform* di Jember (wawancara tanggal 27 April 2001) paling tidak untuk perkebunan wilayah Jember dipimpin oleh seorang yang berpangkat Kolonel.

<sup>18</sup>Lihat Iwan Gardono, “Kehancuran PKI Tahun 1965-1966”, dalam *Jurnal Sejarah* No. 9, “Pemikiran, Rekonstruksi”, dalam *Persepsi* (MSI, 2002.) hlm 7.

<sup>19</sup>Karena dalam praktek politik golongan komunis menggunakan analisa kelas, musuh dan kawan. Ada tujuh musuh yang harus diganyang PKI, yang terkenal dengan istilah tujuh setan desa: tuan tanah penghisap, lintah darat, tukang ijon, kapitalis birokrat (kabir), tengkulak jahat, bandit desa dan penguasa jahat.

<sup>20</sup>Menurut salah seorang aktivis Pemuda Rakyat wilayah Jember Kota menyatakan dirinya melakukan aksi solidaritas dalam rangka menjalankan aksi di perkebunan di Semboro, Jember bagian Utara. (Wawancara tanggal 25 April 2001)

<sup>21</sup>Tindakan itu sangat menakutkan bagi kekuatan mapan di pedesaan, karena yang melakukan aksi adalah rakyat dari golongan yang betul-betul miskin, sehingga dalam aksinya terkadang liar dan agitatif.



terdengar teriakan: ganyang tuan tanah, haji ini antek Masyumi, ganyang tujuh setan desa dan teriakan lainnya.<sup>22</sup> Aksi tersebut justru meningkatkan resistensi kontra *aksi sepihak*, yang didukung oleh kekuatan golongan muslim.<sup>23</sup> Di Semboro, Jember bagian Utara misalnya kekuatan pro *aksi sepihak* melakukan pematokan sawah salah seorang warga yang dianggap bagian dari tujuh setan desa. Keesokan harinya pemilik dengan didukung pemuda dari kalangan Nasionalis dan Ansor melakukan pencabutan patok di sawah dan melakukan perlawanan hebat yang menyebabkan kematian salah seorang anggota BTI.<sup>24</sup>

Konflik semakin meningkat manakala beredar isu kalau *aksi sepihak* PKI telah menyerempet tanah wakaf. Tentu hal ini merupakan hal yang sangat sensitif bagi kalangan muslim. Bagi warga NU (secara teoritik) tanah wakaf adalah milik publik dan merupakan bagian dari ibadah kepada Tuhan. Pondok Pesantren penghidupannya bergantung pada wakaf dari para pemilik tanah yang kaya dan juga dari produksi tanah yang dikelola pesantren

sendiri. Pengelolaannya sendiri membutuhkan banyak tangan guna pengaturan yang sesuai dengan amanat pewakafnya. Berangkat dari kaca mata ini tanah wakaf tidak mungkin jatuh dalam kategori objek *landreform*. Persoalannya kemudian adalah banyak tuan tanah yang melakukan proses "wakafisasi" kepada Kiai atau pesantren guna mendapat perlindungan dari ancaman agenda *landreform*. Kecurangan semacam tidak luput dari serangan kaum komunis. Inilah kemudian yang menyebabkan gagasan pelaksanaan agenda *landreform* mengalami pergeseran ke arah isu yang sifatnya dianggap sebagai tindakan anti agama.

Sebagaimana realisasi tindakan *aksi sepihak* yang dianggap (dan ini diyakini betul oleh kalangan elit NU) banyak merugikan warga NU di berbagai daerah di Jawa Timur, maka Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur mendesak kepada Pemerintah Pusat agar tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan amusyawarah, bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta dikecam sebagai tindakan yang bertentangan

<sup>22</sup>Wawancara dengan KH. Yaqub tanggal 31 Agustus 2000, bandingkan dengan Pipit Rochijat, *Am I PKI or Non-PKI, Indonesia*. No. 40 (Oktober) 1985. Lihat juga dalam tulisan Aminudin Kasdi, *Kaum Merah Menjarah, Aksi Sepihak PKI/BTI di Jawa Timur 1960-1965* (Yogyakarta: Jendela, 2001) dan Hermawan Sulisty, *Palu Arit di Ladang Tebu, Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan (1965-1966)*, (Jakarta: KPG, 2000).

<sup>23</sup>Juga menurut salah seorang mantan panitia *landreform* Jember yang sekaligus pengurus organisasi petani yang berafiliasi ke PNI tindakan PKI dan BTI itu mengesankan bahwa organisasi merekalah yang paling berjasa terhadap kaum tani Indonesia. Jelas ini mengecilkan peran serta organisasi kaum tani lainnya yang sama-sama memperjuangkan keadilan bagi kaum tani. Wawancara 27 April 2000.

<sup>24</sup>*ibid.*

dengan instruksi Pejabat Presiden tanggal 15 Juni 1964. PWNU Jawa Timur menyatakan *aksi sepihak* sebagai tindakan kontra-revolusi.<sup>25</sup> Guna menindaklanjuti usulan *jam'iyahnya*, pada tanggal 9 Desember 1964 PBNU mengutus delegasinya ke Kejaksaan Agung guna meminta Kejaksaan Agung lebih berkonsentrasi pada soal yang dianggap telah membahayakan persatuan nasional itu.<sup>26</sup>

Pada dasarnya NU sebagaimana tercermin dalam perayaan ulang tahun GP Ansor tahun 1964 juga menegaskan pentingnya pelaksanaan agenda *landreform*. Bagi GP Ansor pelaksanaan UUPA harus dijalankan dengan menggunakan instansi yang berkompeten. Tidak bisa rakyat langsung melakukan panen sendiri atau *menandur* bibit begitu saja.<sup>27</sup> Pada titik inilah Hefner (2001, 106-107) berkesimpulan jelas sudah PKI keliru memahami kekuatan dirinya dan kelemahan

lawan-lawan politiknya. Para elit PKI mulai sadar dan mengakui bawah kekuatannya "kontrarevolusioner" berhasil merintang segala bentuk kampanye yang mereka lancarkan di berbagai pedesaan. Pada akhirnya elit PKI semenjak bulan Desember 1964 mulai berusaha meredam *aksi sepihak* para anggotanya dan menarik diri dari kampanye *landreform*. (Rex Mortimer, 1972). Sayangnya isu politik yang dibungkus sentimen keagamaan pada tahun-tahun tersebut sudah semakin dominan. Semakin meningkat dengan terjadi peristiwa 13 Januari 1965 di desa Kanigoro Kediri yang menjadi "mitos" di kalangan umat Islam. (Hefner 2001, 100-101). Pada waktu Subuh, sekelompok kader PKI menyerang training organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII) organisasi yang dekat dengan Masyumi.<sup>28</sup> Melalui bentrokan singkat, kader PKI berhasil menaklukkan para aktivis PII, mengikat

<sup>25</sup>Surabaya Post, 8 Djuli 1964.

<sup>26</sup>Sebenarnya Bung Karno sendiri telah mengeluarkan Intruksinya pada 12 Juli 1964 agar semua perdebatan mengenai *landreform* dihentikan. *Duta Masyarakat*, 10 Desember 1964.

<sup>27</sup>Wawancara dengan salah seorang elit Ansor di Jakarta, tanggal 18 Juli 2002. Hal senada juga dikatakan oleh KH. Muchith Muzadi di Jember dalam wawancara 28 Agustus 2000.

<sup>28</sup>Pada dasarnya PKI ingin menegaskan dua hal: (1) bahwa yang menjadi problem bukanlah Islam atau masyarakat Islam, tapi kalangan Masyumi, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan PII yang kontrarevolusioner, (2) PKI berupaya menegaskan pentingnya proses distribusi sumber agraria. Sayangnya dalam prakteknya PKI menggunakan cara-cara yang sangat demonstratif. Hal itu tampak dari berbagai aksi yang dijalankan, salah satunya adalah demonstrasi guna menretool beberapa menteri penting dan pejabat di daerah yang dianggap berlawanan dengan garis perjuangan partai. Lebih hebat lagi terdapat semacam agitasi politik untuk membubarkan HMI. DN Aidit dalam ulang tahun PKI di Jakarta tahun 1965 mengatakan jika Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) tidak dapat membubarkan HMI pada akhir tahun 1965 maka akan dihadiahi sarung. Begitu pula dengan sebagian warga masyarakat yang menjadi sasaran dari aksi sepihak oleh PKI adalah elit Islam di bawah, begitu juga serangan kepada organisasi Islam seperti di atas secara terus-menerus, hal ini secara "sepihak" dimaknai oleh pemimpin umat Islam bahwa dirinya dipaksa menyingkir dari arena politik keindonesiaan.



tangan mereka, lantas digiring sejauh enam kilometer ke kantor polisi. Mereka ditahan dengan tuduhan kontra-revolusioner. Pers-pers muslim melansir insiden tersebut dengan melempar tuduhan kader PKI telah menyerang dan merusak kesucian masjid. Menurut Jacob Walkin (829-830) penyerang juga dituduh telah menganiaya seorang *ustadz* yang menjadi pengajar pada training tersebut serta menginjak-injak *Al-Qur'an*.

### Kekerasan 1965-1966

Sebagaimana pembukaan tulisan ini setelah peristiwa yang terjadi pada dini hari 1 Oktober 1965 merupakan petanda awal bagi terjadinya kekerasan demi kekerasan di Jawa Timur, yang salah satunya melibatkan Banser. Tindak kekerasan tersebut memanfaatkan sikap anti komunis dari kalangan umat Islam Indonesia yang prakteknya memobilisasi berbagai organisasi paramiliter (*civilian vigilantes*). Ini sangat dimungkinkan karena pada tingkat tertentu masih “tumbuh subur” semacam gejala dalam diri masyarakat perilaku mempersekusi dan mengeksekusi kelompok lain (lawan politik) dengan mengatasnamakan identitas sosial baik itu agama, ideologi, suku, ras maupun gender. Karenanya “tidak salah” bila kemudian (ketika) dengan militer yang pada era 1960-an sudah mulai memegang peranan terpenting dalam kehidupan sosial-politik

dan ekonomi nasional melakukan proses mobilisasi guna menghabiskan kekuatan politik yang dianggap berseberangan dan membahayakan eksistensinya dalam suatu “negara”.

Tentu alur tulisan ini akan sedikit berbeda dengan kesimpulan Iwan Gardono Sudjarmiko (2002, 11) yang menyatakan terdapat dua pola pembunuhan yang terjadi di Jawa Timur. *Pertama*, pola di mana massa lebih aktif di Jember dan di Kediri, (2) sementara di Magetan keterlibatan aparat militer lebih dominan karena proses seleksi korban lebih teratur. Tidak terlalu salah pendapat bila Iwan Gardono Sudjarmiko memiliki kesimpulan kalau di Jember dan Kediri terdapat pola massa karena hanya berdasarkan atas wawancara “saksi” non-PKI di Kediri (hanya) 3 orang dan Jember 4 orang. (ibid, 5), tanpa melihat historisitas mengapa pelaku lapangan (massa) melakukan tindakan yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan.

Kendati sejak awal elit NU mencurigai keterlibatan PKI dalam peristiwa 1 Oktober 1965,<sup>29</sup> namun dalam sikapnya terjadi dua pandangan yang berbeda satu sama lain. Pandangan pertama yang masih menginginkan masih menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan. Pandangan ini datang dari kalangan *kiai-kiai* senior di PBNU seperti KH. Wahab Hasbullah dan KH. Idham Chalid.<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Lihat Andree Feillard (1997: 38) yang mewawancarai KH. Moenasir.

<sup>30</sup>*ibid*

Sementara pandangan yang kedua memiliki sikap tegas atas PKI adalah kalangan generasi muda NU—yang memang memiliki kedekatan dengan kalangan elit TNI AD seperti Subhan ZE, Yusuf Hasyim dan Chalid Mawardi. (Nasution, 1988, 273-274).

Akan tetapi yang harus dicatat peristiwa yang mengakibatkan tewasnya tujuh perwira TNI AD itu merupakan petanda rivalitas TNI AD dan PKI semakin tidak bisa dibantah. Peristiwa tersebut menjadi sarana untuk saling menghancurkan.<sup>31</sup> Tampaknya TNI AD lebih siap dengan serangkaian usaha-usaha sistematis guna menghancurkan lawan politiknya.<sup>32</sup> Paling tidak terdapat beberapa hal yang dilakukan oleh TNI AD. *Pertama*, seakan menemukan momentum, elit TNI AD segera membangun semacam “artefak” yang sesuai dengan imajinasi masa depan

mereka. Kemudian muncul beraneka ragam laporan, deskripsi dan analisa perihal berbagai gerakan politik yang dilakukan oleh PKI pada pagi buta saat itu dengan bumbu foto-foto mayat tubuh para Jendral yang telah rusak dengan berbagai keterangan yang dapat membangkitkan emosi massa rakyat.<sup>33</sup> *Kedua*, menghubungi berbagai partai politik dan organisasi massa yang (selama ini) anti komunis guna melakukan mobilisasi politik. Pada tanggal 2 Oktober 1965 Kepala Bagian Politik, Koti Brigjend. Sutjipto mengundang rapat para pimpinan muda dari berbagai partai politik yang ada guna membentuk Komite Aksi Pengganyangan Gestapu (KAP-Gestapu), di mana Subchan ZE (NU) tampil sebagai ketuanya dibantu Harry Tjan Silalahi, SH (Partai Katolik) sebagai sekretarisnya.

Tampaknya sikap politik generasi

---

<sup>31</sup>TNI AD menyatakan PKI sebagai dalang dari peristiwa tersebut, sementara PKI menganggap sebagai gerakan dalam tubuh TNI AD sendiri.

<sup>32</sup>Lihat Hermawan Sulisty, *Op. Cit.*, hlm. 12. Tentang usaha-usaha sistematis TNI AD dalam membersihkan aparah pemerintah dan para pendukung atau yang dianggap pendukung Gestapu.

<sup>33</sup>Laporan dalam bentuk berita yang sifatnya “sepihak” dan propaganda tersebut sangat dimungkinkan mengingat pada tanggal 1 Oktober malam hari *Pepelrada Jaya* No. 01/Drt/10/1965 yang dikeluarkan Mayjend. Umar Wirahadikusumah dalam rangka mengamankan pemberitaan yang simpang siur mengenai peristiwa penghianatan oleh apa yang kenamakan komando gerakan 30 September/Dewan Revolusi, perlu adanya tindakan-tindakan penguasaan terhadap media pemberitaan. Media dilarang terbit kecuali *Berita Yudha* dan *Harian Angkatan Bersenjata*. Surat perintah Pangdam untuk Jakarta Raya. Lihat Julie Southwood and Patrick Planagan, *Indonesia: Law, Propaganda and Terror*, (London: Zed Press, 1983) Hal. 66-71. Laporan resmi hasil otopsi atas tubuh-tubuh para Jendral yang tewas ternyata tidak menyebutkan hal itu. Lihat Benedict Anderson, “How did the Generals Die?”, dalam *Indonesia* No. 43 (April 1987), hal 109-134. Melihat pemberitaan yang sangat provokatif itu Presiden Soekarno mengutuk tindakan para wartawan yang memberitakan persoalan secara berlebihan, seraya menegaskan bahwa hasil otopsi tidak ada perusakan yang mengerikan pada mata dan alat kelamin seperti diberitakan selama ini. Lihat *Suara Islam*, tanggal 13 Desember 1965 dan FBIS, 13 Desember 1965. Mengenai peranan media lihat juga dalam Stanley (2002, 21-32). Saskia E. Weiringa (1998).



muda NU lebih memilih untuk berdiri di belakang TNI AD. Pada tanggal 3 Oktober 1965, GP Ansor mengeluarkan instruksi yang ditandatangani oleh ketuanya Chamid Widjaja kepada anggotanya untuk membantu TNI AD guna memulihkan ketertiban nasional. (Mawardi, 1967). Para *kiai* di PBNU sangat berhati-hati dalam merespon persoalan politik itu. Bahkan pada 14 Oktober 1965, PBNU mengeluarkan "Pedoman Politik Pemberitaan Harian NU" yang dikirim ke lima media masa dan berisikan untuk tetap menjaga hubungan baik dengan PKI, dengan Presiden Soekarno dan tidak turut menyerang Angkatan Udara serta ABRI pada umumnya. (Lihat Andree Feillard, 1997, 40)

Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kalangan muda NU yang kebetulan besinggungan terus dengan elit TNI AD terus bergerak guna mengobarkan semangat anti komunis. Kurang lebih lima hari setelah peristiwa 1 Oktober Subchan ZE, menurut Choirul Anam (1994, 58) menemui beberapa Ulama strategis NU di daerah Situbondo dan

Probolinggo. Di Situbondo dengan menumpang helikopter Angkatan Laut menemui KH. As'ad Syamsul Arifin di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Asembagus. Lantas ke Pondok Pesantren Nurul Jadid guna menemui KH. Zaini Mun'im. Tidak ketinggalan pula menurut pengakuan salah seorang elit GP Ansor saat itu ikut mensosialisasikan sikap anti komunis keliling ke Jawa Timur pada bulan Oktober 1965 itu pula. Tampaknya apa yang dilakukan oleh kalangan muda NU itu mendapat dukungan penuh dari para elit TNI AD dengan dibekali dan dilengkapi pistol yang didapat dari elit RPKAD.<sup>34</sup> Di Jember, mereka langsung melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan pengurus Ansor Jember. Selain itu juga menemui beberapa *kiai* yang punya sikap "tegas" kepada PKI, seperti Achmad Sidiq dari NU dan Mursyid dari Masyumi.<sup>35</sup>

Di rasa tidak cukup, pada bulan yang sama kalangan elit TNI AD "menugaskan" anggotanya yang masih aktif di kemiliteran dan yang memiliki latar belakang NU<sup>36</sup> guna datang ke berbagai kota di

<sup>34</sup>Wawancara dengan salah satu elit GP Ansor tahun 1965 18 Juni 2002. Kendati demikian hingga pulang pistol-pistol itu masih utuh pelurunya, karena tidak pernah dipakai.

<sup>35</sup>*Ibid.*

<sup>36</sup>Maksud saya memiliki latar belakang NU karena beliau adalah seorang santri. Masa pendidikannya dihabiskan di Pesantren Tebu Ireng dan aktif di ANO serta aktifitas ke-NU-an lainnya, selain itu beliau dekat dengan para petinggi NU. (wawancara di Jakarta, tanggal 24 Mei 2002) Karenanya dalam konteks keterlibatannya dalam mensosialisasikan peristiwa politik versi Angkatan Darat tahun 1965, saya mengalami kesulitan untuk membedakan tugas militer dan tugas dari NU. Kendati demikian dalam wawancara tersebut terbersit pengakuan kalau beliau setelah keliling ke Jawa Timur lebih banyak berkoordinasi dengan atasannya di Angkatan Darat di Kostrad dari pada dengan organisasi NU.

Timur guna mensosialisasikan tentang hakekat "G 30 S" dan siapa dalangnya kepada warga NU. Berbekal semangat *pelihara teritorial*<sup>37</sup> negara kesatuan "utusan" TNI AD itu keliling Jawa Timur. Kendati pola yang dilakukan hampir sama dengan apa yang dilakukan oleh para elit GP Ansor di atas yakni mengumpulkan dan diskusi dengan elit *kiai-kiai* NU dan tokoh masyarakat lainnya. Namun utusan ini lebih menekankan untuk bertemu dengan kalangan yang non-NU yang sejak awalnya anti Komunis. Baginya untuk menghadapi kekuatan komunis yang harus ditemui adalah orang yang berani bukan yang penakut.<sup>38</sup>

Sosialisasi peristiwa politik yang terjadi di Jakarta versi TNI AD juga dilakukan oleh Pangdam Jawa Timur, Basuki Rachmad. Pada awalnya Gubernur Jawa Timur, Wijono mengundang para *kiai* terkemuka guna membahas sikap Masyarakat Jawa Timur atas peristiwa politik di Jakarta. Sedikitnya 30 *kiai* hadir dalam pertemuan tersebut, di antaranya KH.

Mahrus Ali (Kediri), KH. Zaini Mun'm (Paiton), KH. Djauhari (Kencong, Jember), KH. As'ad Syamsul Arifin (Situbondo) dan lain-lainnya serta Koen Shalahuddin salah seorang Ketua Ansor Jawa Timur. Pada pertemuan tersebut Pangdam mengadakan ke Ulama tentang perbuatan dan fitnahan PKI kepada TNI AD. Guna menarik simpati Basuki Rachmat minta fatwa para *kiai* mengenai apa yang harus dilakukan. Suasana penuh emosi akibat cerita peristiwa Jakarta versi TNI AD kontan saja KH. As'ad mengambil surbannya dan mengikatkan di kepalanya rapat-rapat dan langsung berfatwa nyawa ketujuh perwira TNI AD itu harus "ditebus" oleh PKI.<sup>39</sup> pada akhirnya pertemuan di Kantor Gubernur Jawa Timur itu menghasilkan kesepakatan mendukung TNI AD guna melakukan pembersihan PKI.<sup>40</sup>

Selain itu pihak jajaran TNI AD di berbagai daerah juga memfasilitasi pertemuan dengan berbagai kekuatan yang anti komunis. (Lihat juga Hermawan Sulisty, o,

---

<sup>37</sup>Tampaknya *pelihara teritorial* ini merupakan istilah kemiliteran yang tampaknya menjadi kata kunci mengapa proses pembantaian 1965-1966 kemudian terjadi. Menurut hasil wawancara yang saya lakukan dengan santri yang juga anggota Angkatan Darat di atas, istilah tersebut merupakan perintah dari Kostrad. Paling tidak ada dua hal dalam proses *pelihara teritorial* itu, (1) menjaga negara kesatuan, tentu saja dalam versi tentara. (2) mempertahankan diri, artinya sebelum lawan menyerang harus didahului. Hal ini sudah jelas ditujukan kepada lawan politik TNI Angkatan Darat yaitu PKI. Wawancara di Jakarta tanggal 24 Mei 2002.

<sup>38</sup>*Ibid.*

<sup>39</sup>Choirul Anam, KHR. As'ad Syamsul Arifin, *Riwayat Hidup dan Perjuangannya* (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1994) hlm. 67-68. Hal senada juga dikemukakan oleh salah seorang *kiai* Jember yang ikut menghadiri pertemuan Ulama tersebut. 29 Februari 2001

<sup>40</sup>Choirul Anam, *Op. Cit.*, hlm. 67.



2000) Di Jember, Kodim juga memberi instruksi kepada berbagai instansi pemerintahan guna melakukan *screening* pada para pegawainya. Selain itu para ketua Rukun Tetangga (RT) yang diorganisir oleh ketua Rukun Warga (RW) dikumpulkan guna mendapat pengarahan dari pihak Komandam Kodim, Winoto. Dalam pengarahan tersebut diceritakan perihal kudeta oleh PKI dan kekejamannya di Lubang Buaya Jakarta.<sup>41</sup> Apa yang terjadi sesungguhnya merupakan proses propaganda yang mengarah pada tindakan "irasional".

Selain itu pada pertengahan Oktober 1965 Ansor dan Banser di berbagai daerah di Jawa Timur mulai menggelar Apel Akbar guna menunjukkan sikapnya atas peristiwa politik yang telah terjadi di Jakarta. Tampaknya berbagai Apel yang dilakukan oleh warga NU tersebut menjadi legitimasi strategis guna melakukan tindakan persekusi dan eksekusi terhadap warga komunis. Semua tuntutan politik yang dikumandangkan di setiap daerah bisa dikatakan sama satu sama

lainnya, yakni: Pembubaran PKI dan PKI dianggap sebagai partai terlarang di Indonesia. Di luar statemen politik tersebut (tentu) dengan sendirinya dianggap berada di luar arus besar dan memiliki konsekuensi tersendiri.<sup>42</sup> Di Jember Apel Akbar yang mengecam tindakan PKI di Jakarta itu yang menjadi inspektur upacaranya adalah Bupati Sudjarwo. Selanjutnya dilanjutkan dengan orasi-orasi dari beberapa warga NU yang isinya tidak berbeda dengan isi tuntutan Apel Akbar tersebut.

Tanpa menyadari adanya "provokasi" suasana yang seperti itu, Banser mulai terlibat aktif dalam tindak kekerasan. Dipimpin Hisbullah Huda yang juga merupakan ketua GP Ansor Jawa Timur mengambil inisiatif terlebih dahulu tanpa menunggu komando karena di Kodan Jawa Timur hanya tersisa empat batalyon yang tentu saja tidak mencukupi untuk menumpas PKI. (Chalid Mawardi, 1967:55). Jawa Timur pada bulan-bulan terjadinya proses pembersihan waga komunis, elit Banser sering diundang rapat

<sup>41</sup>Wawancara dengan salah seorang anggota RT di Jember, tgl 22 Desember 2001

<sup>42</sup>Adalah KH. Idham Chalid Ketua Umum PBNU, yang menurut pemberitaan 'Suluh Indonesia' pada tanggal 7 Februari 1966 tidak secara tegas mengemukakan tuntutan NU tentang pembubaran PKI. KH. Idham Chalid dalam pidato politiknya pada peringatan hari Ulang Tahun ke 40 organisasi yang berlambang bintang sembilan dengan tali yang melingkari bumi tanggal 30 Januari 1966 bermaksud tetap menjaga hubungan baik dengan Presiden Soekarno dan komponen bangsa lainnya. Kontan menyebabkan golongan muda NU yang berada dalam GP Ansor sangat marah. Melalui Chalid Mawardi Sekretaris Jendral GP Ansor, kemudian secara terbuka dan tegas menyatakan kalau NU tetap menghendaki pembubaran partai politik yang berhaluan komunisme itu beserta berbagai organisasi dibawahnya.

bersama Kodim guna merumuskan strategi penumpasan warga PKI. Sebagaimana dituturkan oleh Abdul Rohim (elit Banser Kediri) yang diundang oleh Mayor Chambali (Komandan Kodim Kediri) yang meminta dukungan Banser. Alasannya dalam tubuh ABRI sendiri masih sulit dibedakan mana yang anggota PKI dan yang bukan. (Agus Sunyoto, 1996:154) Hal serupa juga terjadi di Blitar, di mana pihak Kodim selalu mewanti-wanti para anggotanya agar mereka hanya percaya kepada kalangan *santri* saja.

Hampir setiap hari pada tahun-tahun tersebut terus bergema yel-yel PKI beserta *onderbouwnya* dianggap sebagai organisasi politik terlarang. Tidak jarang aksi demonstrasi yang dilakukan sudah mulai menjurus ke arah kekerasan, pembakaran dan penjarahan tidak hanya menimpa gedung dan rumah milik orang-orang PKI, tapi juga rumah dan toko milik warga Cina. Sangat sulit guna melacak siapa yang mengawali adanya berbagai perusakan terhadap semua asset PKI tapi juga perusakan terhadap sarana umum.

Dari penyerangan sektretariat PKI tersebut kemudian beredar isu di tengah masyarakat bahwa telah ditemukan berbagai senjata yang akan digunakan untuk melakukan kudeta dan bermacam dokumen yang berisi daftar beberapa

nama *kiai* dan tokoh warga NU yang akan dibunuh oleh PKI. Hal ini kemudian menjadi keyakinan yang meluas dikalangan warga NU kalau mereka tidak membunuh nanti akan dibunuh oleh orang-orang PKI. Menurut salah seorang mantan elit Ansor sangat sulit untuk melacak kadar kebenaran dokumen tersebut. Di tengah situasi yang sangat mendukung kemarahan "massa rakyat" secara otomatis membuat setiap orang tidak bisa lagi berpikir jernih tentang beberapa data yang konon ditemukan di kantor PKI.<sup>43</sup> Menurut wawancara Forum Keadilan No. 01, 11 April 1999 dengan KH. Yusuf Hasyim, "Di daerah-daerah terpencil selalu ditemukan dokumen-dokumen dari Komando militer tingkat kecamatan dan desa, berupa daftar nama-nama orang-orang yang diincar (oleh PKI, penulis) baik itu dari Ansor, NU dan tokoh-tokoh lainnya." Menurutnya ia



<sup>43</sup>Wawancara tanggal 18 Juli 2002. Padahal bisa jadi hal yang sebaliknya, dari penyerangan ke kantor-kantor PKI dan ormas-ormasnya malah ditemukan daftar anggota komunis. Sehingga dengan mudah militer dibantu oleh Banser dan kekuatan lain melakukan identifikasi seseorang yang dianggap menjadi anggota PKI.



menemukan dokumen seperti tersebut di daerah Tulung Agung dan di tepi pantai Blitar. Dengan diketemukannya dokumen tersebut seluruh jajaran GP Ansor dan Banser ikut mulai mengobarkan semangat *jihād fīy sabilillāh* (perang di jalan Allah SWT). Tidak itu saja, spontan warga jama'ah NU yang merasa terancam akan diserang oleh PKI bersiap-siaga.

Adanya informasi kalau tidak membunuh maka dibunuh itulah Banser semakin aktif membantu TNI AD guna melakukan operasi "pengamanan" orang yang dituduh dan diduga anggota PKI. Selain itu anggota Banser juga menjaga para tahanan yang ditempatkan di rumah atau di gudang-gudang tembakau (kalau di Jember), mengingat penuh sesaknya penjara akibat penangkapan yang terus-menerus. Tidak itu saja, Banser juga bertugas untuk ikut mengawal para tahanan dari penjara hingga tempat-tempat eksekusi. Termasuk menyiapkan lubang untuk warga komunis yang akan menjalani eksekusi. Kendati demikian tidak jarang para anggota Banser melakukan penghilangan nyawa warga PKI secara sewenang-wenang yang menafikan nilai-nilai kemanusiaan atas dasar inisiatif sendiri. Menurut mantan ketua Ikatan Sarjana Rakyat Indonesia (ISRI) Jember

(afiliasi pada PNI)<sup>44</sup> keterlibatan Banser dan kekuatan paramiliter lainnya di Jember secara langsung lebih banyak dikarenakan dorongan dari aparat militer. Pihak Kodim "mengirimkan" beberapa tahanan dan juga Kodim telah menyediakan lobang yang berukuran luas untuk "dimanfaatkan" oleh para anggota Banser dan paramiliter lainnya.<sup>45</sup> Paling tidak menurut hasil penelusuran Crouch (1986, 167), semua proses penangkapan para aktifis komunis yang dilakukan aparat keamanan itu mulai efektif berjalan pada sejak pertengahan bulan Oktober 1965. Karena semua institusi pertahanan yang ada dalam masyarakat "dipaksa" secara cepat untuk menjadi kekuatan paramiliter. Pada tingkat yang lebih tinggi institusi pertahanan tersebut sekaligus menjadi satuan "hukum" yang dapat mengeksekusi masyarakat yang dianggap sebagai komunis.

### Akhiran

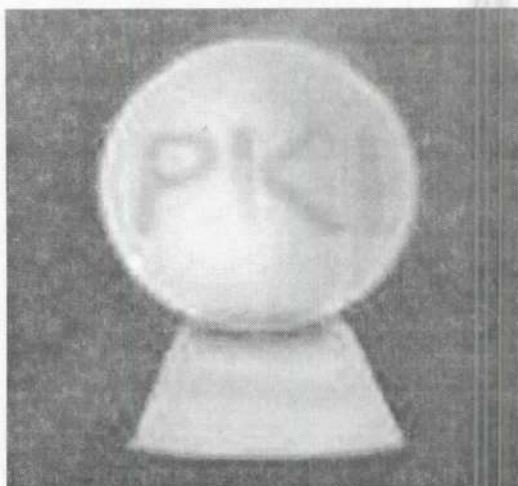
Sebagaimana telah kita lihat tragedi kemanusiaan 1965-1966 bukan merupakan peristiwa yang begitu saja terjadi. Ia memiliki begitu panjang proses historisitas dan begitu rumit persoalan yang menyertainya. Tidak saja berkenaan dengan perebutan identitas antar masing-masing

<sup>44</sup>Wawancara tanggal 5 September 2000.

<sup>45</sup>Namun yang patut dijadikan catatan menurut KH. Muchith Muzadi tidak semua anggota Banser setuju dengan tindakan menerima para tahanan yang "dikirim" pihak aparat keamanan. Sehingga mereka melakukan desakan kepada organisasinya guna pengembalian para tahanan kepada pihak aparat keamanan, sebuah tindakan yang dapat membahayakan dirinya karena bisa-bisa menjadi sasaran dan dituduh sebagai orang yang pro-komunis. Karenanya proses eksekusi lebih sering dilakukan oleh kalangan aparat keamanan sendiri. Wawancara tanggal 28 Agustus 2000.

kelompok yang kemudian merasa paling berhak mendefinisikan nation Indonesia, tapi juga pertarungan yang lebih kongkret perebutan atas sumber daya agraria. Hingga pada akhirnya meletuslah tragedi kemanusiaan 1965-1966, peristiwa yang melibatkan banyak elemen bangsa sebagai pelakunya, termasuk NU dengan Bansernya. Namun NU meminjam Andree Feilard (1997, 56) bukanlah organisasi monolitik, lebih menyerupai asosiasi para Ulama dan individu-individu yang berasal dari latar belakang yang sangat berbeda-beda dan memiliki kepentingan yang beragam pula. Sehingga dalam menyikapi meletusnya peristiwa politik yang menyebabkan tewasnya tujuh pewira tinggi TNI AD tahun 1965 paling terdapat dua pandangan yang berbeda, sikap yang ingin tetap menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan dengan sikap tegas anti komunis. Peristiwa politik tersebut merupakan petanda bagi ketegangan PKI dan TNI AD merupakan hal yang tak terbantahkan.

Mengingat hubungan "baik" antara kalangan yang memiliki sikap tegas pada PKI yang kebetulan diwakili oleh generasi muda tersebut lebih memainkan peranan di dalam organisasi pesantren ini. Pada akhirnya mendorong keterlibatan Banser sayap non intelektual NU (meminjam istilah Hermawan Sulisty) sebagai salah satu pelaku lapangan. Karena di banyak tempat di Jawa Timur menyatakan pelaku lapangannya tidaklah tunggal. Senada dengan itu, Hefner (1999, 351) yang



melakukan penelitian di daerah Pasuruan, juga menyatakan adanya para pelaku kuncinya bukan seluruhnya penduduk warga setempat yang sudah terprovokasi guna melakukan kekerasan, tapi juga orang dari desa lain yang dalam waktu yang relatif singkat sudah bergabung dalam organisasi NU, dan mereka dipersenjatai serta dikomandoi oleh Kodam Brawijaya. Bahkan pelakunya tidak jarang terdapat kelompok-kelompok *cross boy* yang dilepas dari arahan militer, seraya menyalahkan para elit NU. Kelompok terakhir ini terlibat dalam proses pembunuhan sewenang-wenang ekstra yudisial bukan karena alasan "ideologis" melainkan lebih memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penjarahan dan perampokan harta-benda milik korban. Melihat hal itu semua, Presiden Soekarno hanya bisa menginstruksikan guna menghindari berlangsungnya tindak kekerasan yang dapat menjurus pada perang saudara. ❖